

# SKRIPSI

## PENGARUH INKLUSI KEUANGAN TERHADAP KEMISKINAN MASYARAKAT NELAYAN DI KABUPATEN BULUKUMBA

AHMAD FADILLA



DEPARTEMEN ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2019



# SKRIPSI

## PENGARUH INKLUSI KEUANGAN TERHADAP KEMISKINAN MASYARAKAT NELAYAN DI KABUPATEN BULUKUMBA

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh

gelar Sarjana Ekonomi

**AHMAD FADILLA**

**A11114316**



Kepada

**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2019**



# SKRIPSI

## PENGARUH INKLUSI KEUANGAN TERHADAP KEMISKINAN MASYARAKAT NELAYAN DI KABUPATEN BULUKUMBA

Disusun dan diajukan oleh

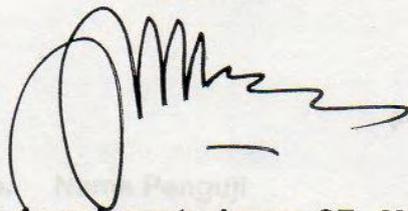
**AHMAD FADILLA**

**A111 14 316**

Telah dipertahankan dalam sidang skripsi

Makassar, 30 April 2019

Pembimbing I



**Dr. Anas Iswanto Anwar, SE., MA**  
NIP. 19630516 199003 1 001

Pembimbing II



**Drs. Bakhtiar Mustari, M.Si**  
NIP. 19590303 198810 1 001

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Hasanuddin



**Dr. Sanusi Fattah, SE., M.Si**  
NIP 19690413 199403 1 003



# SKRIPSI

## PENGARUH INKLUSI KEUANGAN TERHADAP KEMISKINAN MASYARAKAT NELAYAN DI KABUPATEN BULUKUMBA

Disusun dan diajukan oleh

**AHMAD FADILLA**

**A111 14 316**

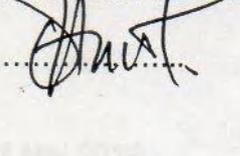
Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi

Pada tanggal **30 April 2019** dan

dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

**Menyetujui,**

**Panitia Penguji**

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Anas Iswanto Anwar, SE., MA.	Ketua	1..... 
2.	Drs. Bakhtiar Mustari, M.Si.	Sekretaris	2..... 
3.	Dr. Fatmawati, SE., M.Si.	Anggota	3..... 
4.	Dr. Ilham Tajuddin, SE., M.Si.	Anggota	4..... 
5.	Dr. Sabir, SE., M.Si.	Anggota	5..... 

**Ketua Departemen Ilmu Ekonomi**

**Fakultas Ekonomi dan Bisnis**

**Universitas Hasanuddin**



**Dr. Sanusi Fatah, SE., M.Si**

**NIP 19690413 199403 1 003**



## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : AHMAD FADILLA  
Nim : A11114316  
Jurusan/program studi : ILMU EKONOMI / STRATA 1

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul  
**PENGARUH INKLUSI KEUANGAN TERHADAP KEMISKINAN MASYARAKAT  
NELAYAN DI KABUPATEN BULUKUMBA**

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur ciplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 07 Mei 2019

Yang membuat pernyataan,



AHMAD FADILLA



## PRAKATA



*Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, karunia dan anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, sebagai panutan terbaik dalam segala sisi kehidupan, beserta keluarga, sahabat, dan semua pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Atas izin Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PENGARUH INKLUSI KEUANGAN TERHADAP KEMISKINAN MASYARAKAT NELAYAN DI KABUPATEN BULUKUMBA” Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan jenjang pendidikan strata 1 (S1) pada jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar.

Dengan penuh kerendahan hati, penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya masukan dan kritik yang membangun, agar nantinya bisa dihasilkan sebuah karya ilmiah yang lebih baik. Penulis juga menyadari bahwa lahirnya karya tulis ini tidak lepas dari adanya dukungan dari banyak pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Terima kasih sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya secara khusus kepada kedua orang tua, **Bapak Muh. Ali Mallangre dan Ibunda Hasmawati** serta saudara penulis **Ahmad Adriadi**, atas segala doa, pengorbanan dan dukungannya selama ini baik secara moril maupun

semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT. Aamin.



Dalam kesempatan ini, peneliti juga merasa wajib hukumnya menyampaikan rasa terima kasih tak terhingga atas bantuan beberapa pihak, yakni kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
2. Bapak Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si., CIPM. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Ibu Prof. Dr. Mahlia Muis, S.E., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Ibu Dr. Kartini, S.E., M.Si., AK. C.A. selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan Bapak Dr. Madris, S.E., DPS., M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
3. Bapak Dr. Sanusi Fattah, S.E., M.Si. selaku ketua Departemen Ilmu Ekonomi Universitas Hasanuddin dan Ibu Dr. Nur Dwiana Sari Saudi, S.E., M.Si. selaku Sekretaris Departemen Ilmu Ekonomi Universitas Hasanuddin.
4. Bapak Dr. Abd. Rahman Razak, SE., M.Si. selaku Penasehat Akademik penulis. Terima kasih atas segala bantuan dan arahan yang senantiasa diberikan hingga penulis dapat menyelesaikan studi di Departemen Ilmu Ekonomi.
5. Bapak Dr. Anas Iswanto Anwar, SE., MA. selaku pembimbing I dan Bapak Drs. Bakhtiar Mustari, M.Si. selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan, arahan, pemikiran, ide, bantuan, nasehat, serta ilmu dalam menyelesaikan skripsi ini.



6. Ibu Dr. Fatmawati, SE., M.Si., Bapak Dr. Ilham Tajuddin, SE., M.Si., Bapak Dr. Sabir, SE., M.Si. selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan serta arahan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah menginspirasi dan bersedia membagi ilmunya kepada penulis, terimakasih atas pembelajaran dan bantuan selama penulis menjalankan studi di Faklutas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
8. Segenap Pegawai Akademik, Kemahasiswaan dan Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Ibu Saharibulan, Ibu Saidah, Pak Masse, Pak Aspar, Pak Iwan, Pak Safar, Pak Askar, Pak Umar, Pak Bur dan Pak Parman terima kasih telah membantu dalam pengurusan administrasi selama masa studi penulis.
9. Buat adinda Andini Rasdin yang telah banyak membantu penulis selama penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas waktu, dukungan, motivasi, “DELL” dan “THOSIBANYA” yang berperan penting dalam penyusunan skripsi ini dari awal sampai selesai.
10. Seluruh peneliti terdahulu yang telah disebutkan dalam daftar pustaka skripsi ini, terima kasih telah memberikan modal intelektual sebagai sumbangsih yang begitu besar dalam penyusunan skripsi ini.
11. Sahabatku serta saudara/i angkatan 2014 “PRIMES”. Terimah kasih atas segala dukungan dan bantuan yang di berikan kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan tugas akhir ini.
12. Keluarga besar UKM Pencak Silat Unhas dan PSHT Unhas. Terima kasih karena telah mengajarkan dan menanamkan kecintaan pada salah satu ahakarya leluhur kita. Semoga kedepan semakin berprestasi, jaga



persaudaraan, dan tetap menjadi wadah bagi pencinta dan pelestari silat Indonesia di kampus merah.

13. Keluarga besar PERBAKIN UNHAS dan saudara se DIKSAR XXVI PBK UH. Terima kasih atas segala dukungan, ilmu, dan motivasi yang telah diberikan. Semoga kedepan semakin berprestasi. HULA HULA HULAAA..

14. Masyarakat Nelayan di Kelurahan Ela-Ela, Bintarore, Bentengnge, Kalumeme Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba atas bantuan dan kesediaanya memberikan informasi selama penulis melakukan penelitian.

15. Seluruh pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu

Akhir kata, tiada kata yang patut peneliti ucapkan selain doa, semoga Allah SWT memberikan balasan dengan sebaik-baik balasan dan senantiasa melimpahkan ridho dan berkah-Nya atas amalan kita, dan menjadikan kita sebagai golongan orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga-Nya yang tertinggi. Amin ya Robbal 'Alamin.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Makassar, 09 Mei 2019

AHMAD FADILLA



## ABSTRAK

### PENGARUH INKLUSI KEUANGAN TERHADAP KEMISKINAN MASYARAKAT NELAYAN DI KABUPATEN BULUKUMBA

#### *THE EFFECT OF FINANCIAL INCLUSIVE TO THE FISHERMAN POVERTY IN BULUKUMBA DISTRICT*

AHMAD FADILLA  
ANAS ISWANTO ANWAR  
BAKHTIAR MUSTARI

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh inklusi keuangan terhadap kemiskinan nelayan di Kabupaten Bulukumba. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik sampling acak (*random sampling*) dan diperoleh sampel sebanyak 100 orang. Variabel yang digunakan meliputi dimensi akses, dimensi penggunaan dan dimensi kualitas. Metode analisis menggunakan analisis regresi linear berganda dengan menggunakan program SPSS versi 24.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dimensi akses, dimensi penggunaan dan dimensi kualitas secara signifikan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan nelayan di Kabupaten Bulukumba.

**Kata kunci:** dimensi akses, dimensi penggunaan, dimensi kualitas dan kemiskinan nelayan

*The purpose of this research is to know the effect of financial inclusive to the fisherman poverty in Bulukumba district. The sampling technique uses a random sampling method and the sample is 100 fisher. The variables used include access dimension, usage dimension and quality dimension. Methods of data analysis using multiple linear regression analysis with SPSS 24 Program.*

*The result of the research indicate that access dimension, usage dimension and quality dimension has a negative and significant impact on the fisherman poverty in Bulukumba district*

**Keywords:** access dimension, usage dimension, quality dimension and fisherman poverty



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	i
<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	iv
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	v
<b>PRAKATA.....</b>	vi
<b>ABSTRAK.....</b>	x
<b>DAFTAR ISI .....</b>	xi
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	xiv
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	xv
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	xvi
<b>BAB I.....</b>	1
<b>PENDAHULUAN .....</b>	1
1.1    Latar Belakang .....	1
1.2    Rumusan Masalah.....	6
1.3    Tujuan penelitaian .....	6
1.4    Manfaat Penelitian.....	7
<b>BAB II.....</b>	8
<b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	8
2.1 Tinjauan Teoritis.....	8
2.1.1 Kemiskinan.....	8
2.1.1.1 Jenis kemiskinan .....	10
2.1.1.2 Indikator Kemiskinan .....	11
2.1.1.3 Penyebab Kemiskinan.....	13
2.1.2 Inklusi Keuangan.....	14
2.1.2.1 Pengukuran Inklusi Keuangan.....	15
2.1.2.2 Sasaran Inklusi Keuangan.....	18
2.2 Hubungan Inklusi Keuangan terhadap Kemiskinan .....	20
2.3 Studi Empiris .....	21
2.4 Kerangka Pikir.....	26
2.5 Hipotesis .....	27
<b>BAB III.....</b>	28
<b>METODE PENELITIAN .....</b>	28
1.1 Ruang Lingkup Penelitian.....	28
1.2 Metode penelitian.....	28
1.3 Variabel Penelitian dan Pengukuranya.....	28



3.4 Populasi .....	28
3.5 Sampel.....	29
3.6 Teknik Pengambilan Sampel.....	30
3.7 Jenis dan Sumber Data .....	30
3.8 Metode Analisis data .....	31
3.8.1 Uji Instrumen .....	31
3.8.1.1 Uji Validitas .....	31
3.8.1.2 Uji Reliabilitas.....	32
3.8.2 Uji Asumsi klasik .....	32
3.8.2.1 Uji Normalitas .....	32
3.8.2.2 Uji Multikolinearitas .....	32
3.8.2.3 Uji Heteroskedastisitas .....	33
3.8.3 Uji Regresi Berganda .....	33
3.8.4 Uji Ketepatan Model .....	34
3.8.4.1 Uji f-Statistik .....	34
3.8.4.2 Koefisien Determinasi.....	34
3.8.4.3 Uji t-Statistik .....	35
3.9 Definisi operasional Variabel .....	35
<b>BAB IV .....</b>	<b>38</b>
<b>PEMBAHASAN .....</b>	<b>38</b>
4.1 Gambaran Umum Penelitian .....	38
4.1.1 Kondisi Geografis .....	38
4.1.2 Gambaran Umum Responden .....	39
4.2 Pengujian Hasil Analisis Data .....	41
4.2.1 Pengujian Instrumen.....	41
4.2.1.1 Uji validitas .....	41
4.2.1.2 Uji Reliabilitas.....	43
4.2.2 Pengujian Asumsi Klasik .....	44
4.2.2.1 Uji Normalitas .....	44
4.2.2.2 Uji Multikolinearitas .....	45
4.2.2.3 Uji Heteroskedastisitas .....	46
4.2.3 Pengujian Ketepatan Model .....	47
4.2.3.1 Uji F.....	47
4.2.3.2 Uji Koefisien Determinasi.....	48



4.2.3.3 Uji T.....	49
4.2.4 Analisis Regresi Berganda .....	50
4.2.5 Pembahasan Hasil Analisis Data.....	51
<b>BAB V .....</b>	<b><u>55</u></b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b><u>55</u></b>
5.1 Kesimpulan.....	55
5.2 Saran-saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA.....	57
LAMPIRAN .....	60



## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Indikator Kemiskinan.....	36
Tabel 3.2 Indikator Dimensi Akses .....	36
Tabel 3.3 Indikator Dimensi Penggunaan .....	37
Tabel 3.4 Indikator Dimensi kualitas .....	37
Tabel 4.1 Jumlah Responden menurut Kelamin .....	39
Tabel 4.2 Jumlah Responden menurut usia .....	39
Tabel 4.3 Jumlah Responden menurut Pendidikan Terakhir .....	40
Tabel 4.4 Jumlah Responden menurut Penghasilan .....	40
Tabel 4.5 Hasil Pengujian Validitas Item .....	42
Tabel 4.6 Hasil Pengujian Validitas Item .....	42
Tabel 4.7 Hasil Pengujian Validitas Item .....	43
Tabel 4.8 Hasil Pengujian Validitas Item .....	43
Tabel 4.9 Hasil Pengujian Reliabilitas .....	44
Tabel 4.10 Hasil Uji Normalitas .....	45
Tabel 4.11 Hasil Uji Multikolienaritas .....	46
Tabel 4.12 Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	47
Tabel 4.13 Hasil Uji F .....	48
Tabel 4.14 Hasil Uji Koefisien Determinasi .....	49
Tabel 4.15 Hasil Uji T .....	49
Tabel 4.16 Hasil Uji regresi Linear berganda .....	50



## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual.....	26
Gambar 4.1 Peta Kabupaten Bulukumba.....	38



## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Kuesioner Penelitian .....	61
Lampiran 2 Tabulasi data hasil Penelitian .....	66
Lampiran 3 Output data .....	69
Lampiran 4 Biodata .....	78



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan permasalahan multidimensional yang telah menjadi isu global karena tidak hanya menjadi permasalahan negara berkembang, tetapi negara majupun mengalami kemiskinan walaupun tidak sebesar negara berkembang. Persoalan kemiskinan di negara maju memiliki dimensi yang berbeda dan merupakan bagian terkecil dalam komponen masyarakatnya. Di negara berkembang persoalannya menjadi luas dan kompleks karena kemiskinan dialami sebagian besar penduduknya. Di Indonesia kemiskinan merupakan kondisi klasik yang masih menjadi permasalahan hingga dewasa ini. pengentasan kemiskinan merupakan salah satu tujuan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan kinerja perekonomian dan mewujudkan kesejahteraan penduduk (Muhammad Nasir, dkk, 2008).

Selama ini berbagai upaya telah dilakukan untuk mengurangi kemiskinan melalui penyediaan kebutuhan pangan, layanan kesehatan dan pendidikan, pemberian dana bergulir, perluasan kesempatan kerja dan sebagainya. Salah satu langkah awal dalam upaya penurunan tingkat kemiskinan yaitu dengan cara mengidentifikasi kelompok dan wilayah sasaran dengan tepat sehingga dapat diketahui kelompok masyarakat mana yang mengalami kemiskinan parah sekaligus sangat rentan menjadi miskin. Hal ini dapat dilakukan dengan pendekatan wilayah dan karakter geografis.

Masyarakat nelayan merupakan salah satu kelompok masyarakat yang saat ini masih bersahabat dengan kemiskinan. Menurut data Badan Pusat Statistik (2017) penduduk miskin di Indonesia mencapai 26,58 juta jiwa dan



61,36 persen diantaranya masyarakat yang hidup dikawasan pesisir dan pedesaan. Bank Dunia menetapkan jumlah pendapatan nelayan di Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan sebesar Rp 520.000 per bulan. Berbagai penyebabnya seperti keterbatasan informasi dan lemahnya permodalan, tingkat pendidikan yang rendah, sehingga pada akhirnya membuat posisi tawar nelayan semakin miskin. Selain itu secara struktural, ada beberapa wilayah pesisir di Indonesia yang notebene merupakan tempat tinggal dan ruang hidup masyarakat nelayan, mengalami perampasan sehingga ruang wilayah kelola nelayan menjadi berkurang.

Salah satu faktor perkembangan perekonomian suatu negara adalah perkembangan sistem keuangan. Sistem keuangan dan perluasan penggunaan jasa keuangan diyakini mampu berperan dalam penurunan tingkat kemiskinan di suatu daerah. Isu kemiskinan nelayan dapat diatasi salah satunya dengan pendekatan ekonomi yang berkualitas melalui perluasan akses jasa keuangan bagi masyarakat nelayan. Tantangan yang saat ini dihadapi adalah masih banyak masyarakat Indonesia yang belum memiliki akses terhadap lembaga keuangan formal, salah satunya adalah kelompok masyarakat nelayan.

Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (2016) menunjukkan Indeks Inklusi Keuangan (IIK) di Indonesia baru mencapai 67,82%. Artinya, baru 67 orang dari 100 penduduk Indonesia yang memiliki akses terhadap produk dan jasa layanan keuangan formal. Dari data tersebut, disinyalir Indeks Inklusi Keuangan nelayan lebih rendah dibanding nasional. Hasil kajian Bank Indonesia menunjukkan permasalahan ini berasal dari dua sumber. Dari sisi permintaan, hambatan yang

masyarakat pesisir ialah keterbatasan pengetahuan dan informasi terkait perbankan, perilaku konsumtif, serta kemampuan pengelolaan keuangan



yang rendah. Sementara dari sisi penawaran, jadwal operasional perbankan tidak sesuai dengan jadwal usaha masyarakat pesisir, lokasi bank yang jauh dari wilayah tempat tinggal, serta belum ada skema pembiayaan yang sesuai dengan masyarakat nelayan.

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional keuangan Inklusif menyatakan bahwa untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap penggunaan jasa keuangan, maka diperlukan upaya strategis melalui sistem keuangan inklusif. Inklusi keuangan didefinisikan sebagai suatu kondisi dimana setiap anggota masyarakat memiliki akses terhadap berbagai layanan keuangan formal yang mempunyai kualitas secara tepat waktu, lancar, dan aman dengan biaya terjangkau sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan pembangunan ditandai dengan kestabilan sistem keuangan yang dapat memberikan manfaat kepada masyarakat luas sehingga keterlibatan seluruh lapisan masyarakat terhadap lembaga keuangan menjadi sangat penting. Bahkan keuangan inklusif menjadi agenda penting dunia dan menjadi pembahasan dalam berbagai forum internasional seperti G20, APEC, AFI, OECD dan ASEAN.

Menurut Bank Indonesia (2013) Awal mula keuangan inklusif menjadi trend pasca krisis tahun 2008 yang berdampak pada masyarakat kelompok *in the bottom of the pyramid* (pendapatan rendah dan tidak teratur, tinggal di daerah terpencil, orang cacat, buruh yang tidak mempunyai dokumen identitas legal, dan masyarakat pinggiran) yang umumnya tidak tersentuh lembaga keuangan.

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

menetapkan Otoritas Jasa Keuangan untuk mengatur dan mengawasi jasa keuangan sekaligus melindungi kepentingan masyarakat dalam



berinteraksi dengan industri jasa keuangan. Dalam melindungi kepentingan masyarakat terdapat aspek literasi dan inklusi keuangan yang memerlukan strategi tersendiri dalam implementasinya. Dalam menyusun strategi yang dimaksud, pada tahun 2013 OJK melakukan survei nasional untuk pertama kalinya terhadap 8.000 responden yang tersebar di 40 wilayah pada 20 provinsi yang hasilnya menjadi pedoman bagi OJK dan industri jasa keuangan dalam melaksanakan kegiatan dalam upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia.

Konsep dasar inklusi keuangan adalah tidak seorang pun yang tertinggal dalam mengakses lembaga keuangan, artinya semua lapisan masyarakat manapun memiliki hak untuk dapat mengakses sistem keuangan sehingga sesuai dengan dasar dan arah kebijakan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemerataan pendapatan, penurunan tingkat kemiskinan dan stabilitas sistem keuangan. Dalam Strategi Nasional Keuangan Inklusif, strategi keuangan inklusif dijabarkan dalam 6 pilar yaitu edukasi keuangan, fasilitas keuangan publik, pemetaan informasi keuangan, kebijakan/peraturan pendukung, fasilitas intermediasi dan distribusi, serta perlindungan konsumen (Bank Indonesia, 2014).

Perkembangan keuangan inklusif di Indonesia terus mengalami peningkatan, hal tersebut dibuktikan hasil survei Literasi dan Inklusi keuangan yang dilakukan oleh OJK untuk kedua kalinya pada tahun 2016. Hasil survei OJK menunjukkan indeks literasi keuangan sebesar 29,66% dan indeks inklusi keuangan sebesar 67,82%. Angka tersebut meningkat dibanding hasil SNLIK

2013, yaitu indeks literasi keuangan 21,84% dan indeks inklusi keuangan 33,33% dan ditargetkan mencapai 75% pada tahun 2019. Meskipun begitu,



keuangan inklusif Indonesia masih rendah jika dibandingkan dengan negara lainya terutama di kawasan ASEAN.

Program ini juga belum sepenuhnya menyentuh sasaran utamanya yaitu masyarakat miskin dan berpendapatan rendah seperti masyarakat pesisir pantai yang berprofesi sebagai nelayan tradisional. Tingginya tingkat kemiskinan dikawasan pesisir membuktikan bahwa program keuangan inklusif belum sepenuhnya memberikan dampak besar terhadap masyarakat miskin agar keluar dari lingkaran kemiskinan.

Berdasarkan uraian sebelumnya, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh inklusi keuangan terhadap kemiskinan masyarakat nelayan di Kabupaten Bulukumba. Beberapa tahun terakhir program Inklusi keuangan ini dinyatakan mampu menjadi solusi atas permasalahan kemiskinan melalui pemerataan pendapatan, stabilitas sistem keuangan dan pertumbuhan ekonomi.

Kabupaten Bulukumba memiliki 10 kecamatan, 7 diantaranya merupakan daerah pesisir yang sebagian besar penduduknya beprofesi sebagai nelayan tangkap dan pembudidaya rumput laut. Selain itu, jika ditinjau dari segi geografis kabupaten Bulukumba merupakan salah satu kabupaten potensial dari segi kelautan dan perikanan karena terletak diantara dua buah lautan yaitu Laut Flores dan Teluk Bone sehingga aktivitas penangkapan ikan tidak akan dipengaruhi oleh musim. Dengan situasi seperti itu seharusnya produksi perikanan akan terjamin keberlangsungannya karena *supply* produksi akan bersifat kontinyu.

Besarnya potensi tersebut belum bisa dimamfaatkan secara maksimal.

lapangan memperlihatkan masih besarnya kemiskinan di beberapa pemukiman nelayan. Sehingga ini yang menjadi alasan bagi peneliti



memilih daerah ini sebagai lokasi penelitian. Oleh karena itu, penelitian dalam skripsi ini diberi judul **“Pengaruh Inklusi Keuangan Terhadap Kemiskinan Masyarakat Nelayan di Kabupaten Bulukumba”**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaruh dimensi akses keuangan inklusif terhadap kemiskinan masyarakat nelayan di Kabupaten Bulukumba?
- b. Bagaimana pengaruh dimensi penggunaan keuangan inklusif terhadap kemiskinan masyarakat nelayan di Kabupaten Bulukumba?
- c. Bagaimana pengaruh dimensi kualitas keuangan inklusif terhadap kemiskinan masyarakat nelayan di Kabupaten Bulukumba?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Rumusan di atas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengaruh dimensi akses keuangan inklusif terhadap kemiskinan masyarakat nelayan di Kabupaten Bulukumba.
- b. Untuk mengetahui pengaruh dimensi penggunaan keuangan inklusif terhadap kemiskinan masyarakat nelayan di Kabupaten Bulukumba.
- c. Untuk mengetahui pengaruh dimensi kualitas keuangan inklusif terhadap kemiskinan masyarakat nelayan di Kabupaten Bulukumba.



#### 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dan kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan mampu menjadi pendukung penelitian selanjutnya mengenai keuangan inklusif dan berbagai permasalahan kemiskinan di wilayah pesisir.
- b. Bagi pemerintah dan otoritas moneter, penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan agar lembaga keuangan dapat lebih memahami kebutuhan masyarakat dalam hal akses terhadap jasa lembaga keuangan.
- c. Penelitian ini dapat menambah wawasan dan kesadaran akan pentingnya keterlibatan seluruh masyarakat dalam program keuangan inklusif.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Teoritis

##### 2.1.1 Kemiskinan

Secara umum, kemiskinan diartikan sebagai kondisi ketidakmampuan pendapatan dalam mencukupi kebutuhan pokok sehingga kurang mampu untuk menjamin kelangsungan hidup (Suryawati, 2004). Rendahnya Kemampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok yang disebabkan oleh pendapatan yang rendah sehingga jaminan terpenuhinya standar kualitas hidup secara umum menjadi berkurang.

Selain itu, berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2004, kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhinya hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kebutuhan dasar yang menjadi hak seseorang atau sekelompok orang meliputi kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan kehidupan sosial dan politik.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dan Departemen sosial Kemiskinan adalah ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak (baik makanan maupun non makanan). Garis kemiskinan yang ditetapkan oleh BPS adalah jumlah pengeluaran yang dibutuhkan oleh setiap individu untuk dapat memenuhi kebutuhan makanan. Kebutuhan makanan setara

2100 kalori per orang per hari dan kebutuhan non makanan yang terdiri perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi, serta aneka



barang dan jasa lainnya (Suharto, 2005). Kondisi masyarakat yang disebut miskin dapat diketahui berdasarkan kemampuan pendapatan dalam memenuhi standar hidup (Nugroho, 1995). Pada prinsipnya, standar hidup di suatu masyarakat tidak sekedar tercukupinya kebutuhan akan pangan, akan tetapi juga tercukupinya kebutuhan akan kesehatan maupun pendidikan. Tempat tinggal ataupun pemukiman yang layak merupakan salah satu dari standar hidup atau standar kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Berdasarkan kondisi ini, suatu masyarakat disebut miskin apabila memiliki pendapatan jauh lebih rendah dari rata-rata pendapatan sehingga tidak banyak memiliki kesempatan untuk mensejahterakan dirinya (Suryawati, 2004).

Suparlan (2000) mendefinisikan bahwa kemiskinan adalah keadaan serba kekurangan harta dan benda berharga yang diderita oleh seseorang atau sekelompok orang yang hidup dalam lingkungan serba miskin atau kekurangan modal, baik dalam pengertian uang, pengetahuan, kekuatan sosial, politik, hukum, maupun akses terhadap fasilitas pelayanan umum, kesempatan berusaha dan bekerja. Lebih jauh lagi, kemiskinan berarti suatu kondisi di mana orang atau kelompok orang tidak mempunyai kemampuan, kebebasan, aset dan aksesibilitas untuk kebutuhan mereka di waktu yang akan datang, serta sangat rentan (*vulnerable*) terhadap resiko dan tekanan yang disebabkan oleh penyakit dan peningkatan secara tiba-tiba atas harga-harga bahan makanan dan uang sekolah (Pandji Indra, 2001).

Kemiskinan menurut World Bank (2000) adalah kehilangan kesejahteraan (*deprivation of well being*). Dalam teori ekonomi semakin tinggi konsumsi seseorang terhadap suatu barang maka tinggi pula tingkat kesejahteraannya.

Definisi kemiskinan dikaitkan dengan kesejahteraan, kemiskinan dapat sebagai keterbatasan seseorang dalam mengakses sumber-sumber



kehidupan baik dari segi pangan, pendidikan dan kesehatan yang disebabkan oleh rendahnya tingkat pendapatan.

### 2.1.1.1 Jenis Kemiskinan

Kemiskinan dibagi dalam empat bentuk, yaitu: (1 ) kemiskinan absolut, kondisi dimana seseorang memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang dibutuhkan untuk bisa hidup dan bekerja; (2) kemiskinan relatif, kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan; (3) kemiskinan kultural, mengacu pada persoalan sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar; (4) kemiskinan struktural, situasi miskin yang disebabkan oleh rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi seringkali menyebabkan suburnya kemiskinan (Suryawati, 2005).

Selanjutnya Sumodingrat (1999), kemiskinan absolut adalah suatu kondisi dimana tingkat pendapatan seseorang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya seperti pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan; *Kedua*, kemiskinan relatif adalah penghitungan kemiskinan berdasarkan proporsi distribusi pendapatan dalam suatu daerah. Kemiskinan jenis ini dikatakan relatif kerana berkaitan dengan distribusi pendapatan antar lapisan sosial. Kemiskinan juga dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu: Kemiskinan alamiah, berkaitan kelangkaan sumber daya alam dan prasarana umum, serta keadaan yang tandus serta kemiskinan buatan, lebih banyak diakibatkan oleh



sistem modernisasi atau pembangunan yang membuat masyarakat tidak mendapat menguasai sumber daya, sarana, dan fasilitas ekonomi yang ada secara merata (Suryawati, 2005).

*United Nation Development Program (UNDP)* meninjau kemiskinan dari dua sisi, yaitu dari sisi pendapatan dan kualitas manusia. Dilihat dari sisi pendapatan, kemiskinan ekstrim (*extreme poverty*) atau kemiskinan absolute adalah kekurangan pendapatan untuk keperluan pemenuhan kebutuhan dasar atau kebutuhan minimal kalori yang diperlukan. Dari sisi kualitas manusia, kemiskinan secara umum (*overall poverty*), atau sering disebut sebagai kemiskinan relatif, adalah kekurangan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan non-pangan, seperti pakaian, energi, dan tempat bernaung (UNDP, 2000).

Penggolongan tipe kemiskinan lainnya adalah kemiskinan persisten, yaitu situasi di mana orang atau keluarga secara konsisten tetap miskin untuk masa yang relatif lama. Di Amerika, yang dimaksud dengan kelompok miskin persisten adalah mereka yang telah menerima tunjangan kesejahteraan selama lebih dari 8 tahun (Pandji-Indra, 2001). Sedangkan kemiskinan transien adalah situasi di mana kehidupan orang atau keluarga secara temporer dapat jatuh di bawah garis kemiskinan bila terjadi PHK, jatuh sakit dan peningkatan biaya pendidikan (Pandji-Indra, 2001). Kondisi seperti ini seperti biasanya ditemui di negara yang mengalami krisis atau dilanda bencana alam.

### 2.1.1.2 Indikator Kemiskinan

Ada dua pendekatan individu tergolong sebagai orang miskin. *Pertama* pendekatan absolut yang menekankan pada pemenuhan kebutuhan fisik

Tolok ukur yang dipakai adalah kebutuhan keluarga, dengan memastikan kebutuhan minimal yang harus dipenuhi oleh suatu keluarga agar dapat melangsungkan kehidupannya secara sederhana, tetapi memadai



sebagai warga masyarakat yang layak. Termasuk didalamnya kebutuhan akan pangan, perumahan, sandang, pemeliharaan kesehatan, dan pendidikan anak. Menurut pendekatan ini, kemiskinan dipahami sebagai suatu keadaan dimana individu atau sekelompok orang tidak mampu mencapai kebutuhan fisik pada tingkat minimal dari standar kebutuhan yang sudah ditetapkan (Suparlan, 1993). *Kedua*, adalah pendekatan relatif yang mendefinisikan kemiskinan dalam kaitannya dengan kebutuhan seseorang di dalam masyarakat. Tolok ukur yang dipakai adalah tingkat pendapatan kepala keluarga per bulan atau per tahun. Berdasarkan tolok ukur ini seseorang yang tergolong miskin ditentukan berdasarkan kedudukan relatifnya dalam masyarakat dengan memperhatikan sejauh mana mutu kehidupannya berbeda dibandingkan dengan rata-rata mutu kehidupan yang berlaku secara keseluruhan. Menurut pendekatan relatif, kemiskinan sekelompok orang dalam masyarakat yang hidup dalam keadaan melarat, terhina, dan tidak layak disebabkan tidak meratanya pembagian pendapatan di dalam masyarakat.

Kemiskinan dapat juga ditentukan dengan cara membandingkan tingkat pendapatan individu atau keluarga dengan pendapatan yang dibutuhkan untuk memperoleh kebutuhan dasar minimum. Dengan demikian, tingkat pendapatan minimum merupakan pembatas antara keadaan miskin dan tidak miskin. Konsep kemiskinan seperti ini dikenal sebagai konsep kemiskinan absolut. Pada koandisi lain bila tingkat pendapatan sudah mencapai tingkat pemenuhan kebutuhan dasar minimum, tetapi masih jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan pendapatan masyarakat di sekitarnya. Dalam pengertian masih berada dalam keadaan miskin bila dibandingkan dengan keadaan masyarakat di sekitarnya.

Kemiskinan seperti ini dikenal sebagai kemiskinan relatif (Esmara, 1986).

Sehingga itu sekurang-kurangnya ada dua pendekatan yang digunakan untuk



mengukur kemiskinan, yaitu pendekatan absolut dan pendekatan relatif. Pendekatan absolut adalah pandangan yang melihat kemiskinan secara mutlak yaitu berdasarkan garis absolut yang biasanya disebut dengan garis kemiskinan. Pendekatan yang kedua adalah pendekatan relatif, yaitu melihat kemiskinan berdasarkan lingkungan dan kondisi sosial.

### 2.1.1.3 Penyebab Kemiskinan

Sharp dkk (2002) mencoba mengidentifikasi penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi, yaitu: pertama, Secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang; kedua, Kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia; ketiga, Kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal.

Menurut Samuelson dan Nordhous (2004) bahwa penyebab dan terjadinya penduduk miskin di negara yang berpenghasilan rendah adalah karena dua hal pokok yaitu rendahnya tingkat kesehatan dan gizi, dan lambatnya perbaikan mutu pendidikan. Menurut Kuncoro (2000) sebagai berikut : 1). Penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah. 2). Kemiskinan muncul akibat perbedaan kualitas sumber daya manusia karena kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitasnya juga akan rendah, upahnya nya pun rendah. 3). kemiskinan muncul karena rendahnya akses modal.

Menurut Kusnadi (2009) kemiskinan nelayan disebabkan oleh dua faktor.

*Faktor Internal* Keterbatasan kualitas sumber daya manusia, keterbatasan kemampuan modal usaha dan teknologi penangkapan, hubungan kerja (pemilik nelayan buruh) dalam organisasi penangkapan yang kurang menguntungkan bagi nelayan buruh, kesulitan melakukan diversifikasi usaha



penangkapan, ketergantungan yang tinggi terhadap okupasi melaut, dan gaya hidup yang dipandang boros yang kurang berorientasi pada masa depan. *Faktor eksternal* Kebijakan pembangunan perikanan yang lebih berfokus pada produktivitas guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sistem pemasaran hasil laut yang lebih menguntungkan perantara, kerusakan akan ekosistem pesisir dan laut karena terjadinya pencemaran dari wilayah darat, penggunaan peralatan tangkap yang tidak ramah lingkungan, penegakan hukum yang lemah terhadap lingkungan, terbatasnya teknologi pengolahan pasca panen, kondisi alam yang fluktuatif sehingga tidak memungkinkan nelayan untuk melaut sepanjang tahun, terbatasnya peluang kerja disektor non perikanan, terjadinya isolasi geografis kampung nelayan yang mengganggu mobilitas barang, jasa, modal dan manusia.

Kemiskinan pesisir merupakan kemiskinan yang disebabkan oleh tingginya kerusakan sumberdaya pesisir, rendahnya kemandirian organisasi sosial desa dan lunturnya nilai-nilai budaya lokal, rendahnya infrastruktur desa serta kesehatan lingkungan permukiman.

### 2.1.2 Inklusi Keuangan

Menurut Bank Indonesia (2014) Inklusi keuangan merupakan seluruh upaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap jasa-jasa keuangan dengan cara menghilangkan segala bentuk hambatan baik yang bersifat harga maupun non harga. Hannig and Jansen (2010) mengungkapkan inklusi keuangan merupakan upaya untuk memasukkan masyarakat *unbankable* ke dalam sistem keuangan formal sehingga memiliki kesempatan untuk menikmati jasa-jasa keuangan seperti tabungan, pembayaran, serta transfer. Selain itu menurut Sarma (2012) inklusi keuangan merupakan sebuah proses yang menekankan kemudahan dalam akses, ketersediaan, dan manfaat dari sistem keuangan formal bagi seluruh pelaku ekonomi. Sehingga dapat disimpulkan



bahwa inklusi keuangan merupakan upaya meningkatkan akses masyarakat khususnya masyarakat *unbankable* ke dalam layanan jasa keuangan formal dengan mengurangi berbagai macam hambatan untuk mengaksesnya.

World Bank (2010) mengungkapkan setidaknya terdapat empat jenis layanan keuangan formal yang dianggap vital bagi kehidupan masyarakat yakni layanan penyimpanan dana, layanan kredit, layanan sistem pembayaran, dan asuransi termasuk di dalamnya dana pensiun. Keempat aspek inilah yang menjadi persyaratan mendasar yang harus dimiliki setiap masyarakat untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik. Peningkatan akses masyarakat kepada lembaga keuangan tersebut tentunya merupakan masalah kompleksitas yang memerlukan koordinasi lintas sektoral yang melibatkan otoritas perbankan, lembaga keuangan non bank, dan kementerian atau lembaga lain yang menaruh perhatian pada upaya pengentasan kemiskinan, sehingga diperlukan kebijakan komprehensif serta menyeluruh dalam suatu strategi nasional inklusi keuangan.

Sedangkan Menurut Kelkar (2009) Keuangan Inklusif adalah jasa keuangan yang diberikan meliputi akses layanan perbankan, kredit, simpanan, asuransi, fasilitas pembayaran dan pengiriman uang yang ditawarkan lembaga keuangan formal dengan biaya yang terjangkau terutama untuk kelompok masyarakat yang kurang beruntung dan berpenghasilan rendah yang cenderung terabaikan. Dengan demikian, inklusi keuangan bukanlah merupakan pilihan, tetapi menjadi sebuah keharusan dan perbankan merupakan pendorong utama untuk mengimplementasikan inklusi keuangan (Nengsih, 2015)

### 2.1.2.1 Pengukuran Inklusi Keuangan

Sarma (2012) mengemukakan ada tiga dimensi yang dapat digunakan mewakili multidimensi dari keuangan inklusif yaitu aksesibilitas (*accessibility*), ketersediaan (*availability*) dan kemanfaatan (*usage*) dari layanan



perbankan. Selain itu, Camara dan Tuesta (2014) menyebutkan bahwa tingkat keuangan inklusif ditentukan oleh tiga dimensi: pemanfaatan (*usage*), hambatan-hambatan (*barriers*), dan akses (*access*). Adapun indikator *usage* menurut Camara dan Tuesta yakni memiliki setidaknya satu produk keuangan, memiliki simpanan, dan memiliki pinjaman di lembaga keuangan formal. Indikator *barriers* diperoleh dari perspektif individu yang *unbank* (tidak berhubungan dengan bank). Informasi hambatan yang dicatat seperti masalah jarak terhadap kantor lembaga keuangan formal, persyaratan dokumen yang sulit dipenuhi, keterjangkauan biaya, dan ketidakpercayaan terhadap sistem keuangan formal. Sedangkan untuk dimensi akses, dilihat dari indikator diantaranya jumlah atm dan jumlah kantor bank terhadap penduduk, juga jumlah atm dan kantor bank dalam radius tertentu.

Untuk mengetahui sejauh mana perkembangan kegiatan inklusi keuangan diperlukan suatu ukuran kinerja yang dinamakan *Index Financial Inclusion* (IFI). Indeks Inklusi keuangan dapat menggabungkan beberapa informasi mengenai berbagai dimensi dari sebuah sistem inklusi keuangan, yaitu akses (*access*), penggunaan (*usage*), dan Kualitas (*quality*) dari layanan Perbankan (Bank Indonesia, 2013).

#### a. Dimensi Akses

Dimensi akses merupakan dimensi yang digunakan untuk mengukur kemampuan penggunaan jasa keuangan formal, sehingga dapat dilihat terjadinya potensi hambatan untuk membuka dan mempergunakan rekening bank, seperti biaya atau keterjangkauan fisik layanan keuangan (kantor bank, ATM, dll).

Indikator yang digunakan dalam mengukur dimensi akses meliputi Jumlah kantor bank per 100.000 penduduk dewasa, Jumlah ATM per 100.000 penduduk, Jumlah kantor bank per 1.000 km<sup>2</sup> dan Jumlah ATM per 1.000 km<sup>2</sup>



### b. Dimensi Penggunaan

Dimensi penggunaan adalah dimensi yang digunakan untuk mengukur kemampuan penggunaan aktual produk dan jasa keuangan, antara lain terkait keteraturan, frekuensi, dan lama penggunaan. Indikator yang digunakan dalam mengukur dimensi penggunaan meliputi Jumlah rekening dana pihak ketiga (deposito, giro, tabungan) per 1.000 penduduk dewasa, Persentase total simpanan masyarakat atau dana pihak ketiga terhadap Produk Domestik Bruto (DPK/PDB), Jumlah rekening kredit per 1.000 penduduk dewasa, dan Jumlah rekening kredit per 1.000 penduduk dewasa

### c. Dimensi Kualitas

Dimensi kualitas adalah dimensi yang digunakan untuk mengetahui apakah ketersediaan atribut produk dan jasa keuangan telah memenuhi kebutuhan pelanggan. Pengukuran terhadap dimensi ini masih sulit untuk dilakukan dan saat ini beberapa lembaga internasional yang *concern* dalam pengembangan inklusi keuangan sedang menyusun indikator dari dimensi kualitas beserta *tools* yang digunakan. Secara umum, *The Alliance for Financial Inclusion* (AFI) telah menyepakati prinsip-prinsip yang digunakan dalam menyusun indikator dari dimensi kualitas, meliputi ringkas, spesifik, sederhana, adanya perbaikan, dan perspektif nasabah.

Pengukuran dimensi kualitas dapat didekati salah satunya melalui pengukuran tingkat literasi keuangan. Tingkat literasi keuangan mengacu pada skor yang dibangun oleh OECD (*Organization Economic Cooperation and Development*). Skor literasi keuangan ini dibangun dari tiga dimensi, yaitu pengetahuan keuangan, sikap terhadap keuangan, dan perilaku keuangan



### 2.1.2.2 Sasaran Inklusi Keuangan

Menurut Bank Indonesia Strategi keuangan inklusif secara eksplisit menyoal kelompok dengan kebutuhan terbesar atau belum dipenuhi atas layanan keuangan yaitu tiga kategori penduduk (orang miskin berpendapatan rendah, orang miskin bekerja/miskin produktif, dan orang hampir miskin) dan tiga lintas kategori (pekerja migran, perempuan, dan penduduk daerah tertinggal).

#### a. Miskin Berpendapatan Terendah

Kategori ini mencakup mereka yang memiliki akses sangat terbatas atau tanpa akses sama sekali ke semua jenis layanan keuangan. Kategori ini mengacu pada golongan sangat miskin yang mungkin menerima bantuan sosial, serta segmen bawah kategori miskin yang menjadi bagian dari program pemberdayaan masyarakat.

#### b. Miskin Bekerja

Kategori ini mencakup orang miskin yang berusaha sendiri, termasuk di dalamnya petani kecil dan marjinal, nelayan, seniman dan perajin, pedagang kecil, dan pengusaha mikro di sektor informal baik di perkotaan dan perdesaan. Kurangnya sumber daya membatasi kemampuan mereka untuk memperluas produksi atau melakukan perbaikan dalam hal produktivitas dan pendapatan.

#### c. Bukan Miskin

Kategori ini meliputi semua penduduk yang tidak memenuhi kriteria untuk masuk dalam kelompok masyarakat miskin berpendapatan terendah dan miskin bekerja.

#### Pekerja Migran Domestik dan Internasional

Indonesia merupakan negara penerima remitansi ketiga terbesar di Asia-Pasifik. Sekitar 80 persen pekerja migran atau lazim disebut TKI



(Tenaga Kerja Indonesia) adalah perempuan dan lebih dari 85 persen bekerja di sector informal. TKI biasanya kurang terlayani oleh sektor keuangan, atau memiliki akses yang terbatas ke layanan keuangan. Mereka terutama membutuhkan sarana untuk mengirim uang secara aman, cepat, dan murah dari tempat kerja ke rumah, yang sering kali terletak di daerah terpencil dan tertinggal. TKI umumnya berasal dari rumah tangga pertanian yang miskin, yang terletak di daerah perdesaan dengan tingkat pendapatan rendah. Mereka memiliki akses yang terbatas ke produk atau jasa keuangan formal untuk mendukung mereka selama proses tahapan migrasi (yaitu, pra, selama, dan pasca migrasi).

#### e. Perempuan

Di banyak negara berkembang, kerap terdapat perbedaan besar antara laki-laki dan perempuan dalam hal akses, kebutuhan, dan pilihan mereka terhadap jasa keuangan; sehingga dalam mengembangkan akses terhadap layanan keuangan, adalah penting untuk mengenali perbedaan-perbedaan tersebut. Di Indonesia, laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk mempunyai rekening tabungan. Namun, motivasi utama laki-laki saat membuka rekening tabungan bank lebih sering adalah untuk memperoleh kredit, sedangkan perempuan menabung demi keperluan mendatang. Dalam hal kepemilikan asuransi, perempuan lebih sering membeli asuransi pendidikan, sementara laki-laki lebih memilih asuransi jiwa, dan pada taraf tertentu juga memiliki asuransi harta benda.

#### f. Penduduk Daerah Terpencil

Sekitar 52 persen penduduk Indonesia hidup di daerah perdesaan dan 70 persennya tidak memiliki akses ke jasa keuangan formal. Dari sekitar 100 juta penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan, sekitar 64



persen tinggal di daerah perdesaan. Angka-angka ini, ditambah dengan kondisi sebaran geografis dari kepulauan Indonesia, menunjukkan pentingnya bagi strategi nasional keuangan inklusif untuk memberi perhatian khusus kepada masyarakat di daerah-daerah terpencil. Kesenjangan akses ke jasa keuangan untuk kategori ini sebagian dapat diatasi dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (misalnya, *mobile money* untuk memfasilitasi transfer dan transaksi pembayaran antar pulau, serta antar perdesaan dan perkotaan).

## 2.2 Hubungan Inklusi Keuangan Terhadap Kemiskinan

Dimensi akses berperan dalam mewujudkan kondisi keuangan yang inklusif maka diperlukan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses berbagai jenis lembaga keuangan. Hal ini bertujuan meningkatkan efisiensi ekonomi, mendukung stabilitas sistem keuangan, mengurangi kesenjangan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya akan menurunkan tingkat kemiskinan.

Lia dan Handriyani (2016) Perluasan penggunaan jasa keuangan diyakini berpengaruh terhadap penurunan tingkat kemiskinan di suatu daerah. Dengan meningkatnya keterlibatan seluruh lapisan masyarakat terhadap jasa keuangan maka tingkat kemiskinan akan menurun dan peningkatan keuangan akan terjadi pada akhirnya akan bermuara pada perkembangan perekonomian suatu daerah atau negara.

Ahmad dan Malik dalam Rakhmindyarto (2014) mengatakan bahwa pengembangan sektor keuangan berpengaruh positif pada GDP per kapita melalui alokasi dana yang efisien dan meningkatkan output per pekerja serta

menyundang masuknya modal asing. Hal ini mengingat bahwa sistem ini dapat menurunkan biaya informasi dan biaya transaksi, meningkatkan



alokasi modal dan likuiditas aset, dan dapat mendorong investasi pada kegiatan yang memiliki nilai tambah tinggi.

Penguatan sektor keuangan khususnya keuangan formal dengan pertumbuhan ekonomi menunjukkan hubungan yang signifikan dalam upaya peningkatan kesejahteraan. Di samping itu, sistem keuangan yang inklusif berperan penting dalam pengentasan kemiskinan dan mengurangi perbedaan pendapatan. Khasnobis dan Mavrotas dalam Rakhmindyarto (2014) mengatakan bahwa mobilisasi yang efektif dari tabungan dalam negeri untuk investasi swasta memainkan peran kunci dalam mencapai pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan. Oleh karena itu sebuah sistem keuangan yang efisien dan inklusif akan memberdayakan individu, memfasilitasi pertukaran barang dan jasa, mengintegrasikan masyarakat dengan perekonomian serta memberi perlindungan terhadap guncangan ekonomi.

### 2.3 Studi Empiris

Terdapat beberapa penelitian terdahulu tentang pengaruh inklusi keuangan terhadap pemberdayaan masyarakat, pemerataan pendapatan, dan stabilitas sistem keuangan yang bertujuan untuk penguatan ekonomi kerakyatan dan penurunan tingkat kemiskinan. Berikut beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini:

**Pertama.** Penelitian yang dilakukan oleh I Made Sanjaya dan Nursechafia pada tahun 2015 yang berjudul “Inklusi Keuangan Dan Pertumbuhan Inklusif: Analisis Antar Provinsi Di Indonesia” Penelitian ini mengukur dan menganalisis tingkat inklusi keuangan dan pertumbuhan inklusif di Indonesia.

Dengan menggunakan data provinsi, penelitian ini menghitung *Index of Financial* (IFI) berdasarkan aksesibilitas, availibilitas, dan penggunaan jasa keuangan. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengurangi



tingkat kemiskinan dengan menggunakan keberlanjutan (*sustainability*) dan inklusifitas (*inclusiveness*) pada dua sektor utama yaitu keuangan dan ekonomi. Hasilnya menunjukkan bahwa inklusi keuangan di Indonesia sangat dipengaruhi oleh dimensi aksesibilitas, sedangkan dimensi availabilitas dan penggunaannya hanya memiliki proporsi yang kecil. Hal ini membawa kita pada kesimpulan bahwa kelompok masyarakat miskin cukup terbatas dalam memanfaatkan layanan jasa sektor keuangan. Lebih jauh lagi, penelitian ini menggunakan fungsi kesempatan sosial (*social opportunity function*) untuk mengukur pertumbuhan inklusif, dan menemukan korelasi positif dengan inklusi keuangan.

**Kedua** penelitian yang dilakukan oleh Ditha Dewi Cahya pada tahun 2017 dalam Skripsinya yang berjudul “Analisis Pengaruh *Financial Inklusion* terhadap pendapatan Pengrajin Rotan di Kecamatan Gatak kabupaten Sukoharjo. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa edukasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan pengrajin rotan, ini dapat dinyatakan dengan nilai  $t_{hitung}$  sebesar  $2,659 > t_{tabel}$  (2,052) dan signifikansinya 0,014. Hak properti masyarakat berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pendapatan pengrajin rotan, ini dapat dinyatakan dengan nilai  $t_{hitung}$  sebesar  $-2,401 > t_{tabel}$  (2,052) dan signifikansinya 0.024. Fasilitas intermediasi dan saluran distribusi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan pengrajin rotan, ini dapat dinyatakan dengan nilai  $t_{hitung}$   $2,831 > t_{tabel}$  (2,052) dan signifikansinya 0.009. Layanan keuangan pada sektor pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan pengrajin rotan, ini dinyatakan dengan nilai  $t_{hitung}$  sebesar  $5,185 > t_{tabel}$  (2,052) dan signifikansinya sebesar 0.000. Perlindungan konsumen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pendapatan pengrajin rotan, ini dinyatakan dengan nilai  $t_{hitung}$  sebesar  $-2,086 < t_{tabel}$  (2,052) dan signifikansinya sebesar 0,048.



**Ketiga** penelitian selanjutnya berjudul “Pengaruh Keuangan Inklusif Terhadap Kredit yang Disalurkan pada Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia” oleh Obaid M Fahmy, M. Rustam, Evi Asmayadi. Dari hasil pembahasan maka diambil simpulan bahwa dimensi akses perbankan secara uji parsial (uji-t) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kredit yang disalurkan pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia, maknanya semakin banyak jaringan kantor bank maka semakin besar kredit yang terserap pada sektor UMKM.

Kedua, dimensi penggunaan layanan perbankan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kredit yang disalurkan pada sektor UMKM (Uji-t), artinya semakin besar penggunaan layanan bank dalam hal ini menyimpan dananya di bank (DPK), maka semakin besar pula pertumbuhan kredit pada sektor UMKM ini. Penelitian ini menggunakan variabel kontrol LDR dan NPL yang menunjukkan bahwa LDR secara bersama-sama dengan variabel akses dan variabel penggunaan layanan perbankan berpengaruh positif signifikan. Sedangkan NPL mempunyai arah negatif namun tidak signifikan.

**Keempat** Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Aditya Halindra Faridzki dalam skripsinya yang berjudul “Pengaruh *Financial Inclusion* ditinjau dari *Demographic branch, geographic branch, Credit Income Ratio, dan Debit Income Ratio* terhadap pengurangan kemiskinan di Indonesia”. Penelitian ini menggunakan data panel dengan jumlah kemiskinan sebagai variable dependen. Dan *Demographic branch, geographic branch, Credit Income Ratio, dan Debit Income Ratio* sebagai variabel independen yang digunakan untuk membuktikan bahwa *financial Inclusion* dapat dijadikan salah satu solusi pengurangan

kat miskin.



**Kelima** Penelitian Hairatunnisa Nasution, Yasir Nasution, Muhammad Yafiz pada 2017 yang berjudul “Analisis *Financial Inclusion* Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Medan (Studi Kasus Pembiayaan Mikro Ss li Di Bank Sumut Syariah)” Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis financial inclusion terhadap pemberdayaan masyarakat miskin di medan dengan objek penelitiannya di Pembiayaan Sumut Sejahtera Bank Sumut Syariah. Secara lebih khusus penelitian ini ingin mengetahui, 1) Konsep *financial inclusion* diimplementasikan menjadi sarana perluasan akses jasa keuangan bank dan non bank, 2) Bagaimana cara Bank Sumut Syariah menerapkan konsep *financial inclusion* terhadap masyarakat.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan perpektif pendekatan kualitatif. Fokus penelitiannya adalah studi *Financial Inclusion* terhadap pemberdayaan masyarakat miskin di Medan dengan studi kasus Pembiayaan Sumut Sejahtera Bank Sumut Syariah dalam rangka mengentaskan dan memberdayakan kemiskinan.

Hasil dari penelitian ini:

1. *Financial Inclusion* pada dasarnya adalah membuka seluasnya akses terhadap jasa keuangan bagi masyarakat khususnya masyarakat golongan bawah sebagai golongan unbank atau juga unbankable. *Financial Inclusion* merupakan representatif dari prinsip-prinsip ekonomi Islam, dimana *business finance* tidak hanya bersifat transaksional untuk mencari profit semata. Akan tetapi *business finance* haruslah bersifat *empowerment*, untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat.
2. Bank Sumut Syariah mempunyai peran signifikan dalam pengembangan

omi masyarakat melalui berbagai pembiayaan mikronya yaitu pembiayaan Sumut Sejahtera. Hal ini tidak terlepas dari kemudahannya



diakses oleh masyarakat. Fasilitas pembiayaan ini memiliki tujuan mulia diberikan kepada masyarakat pra-sejahtera yang memiliki usaha mikro untuk meningkatkan peran masyarakat dalam menopang ekonomi keluarga dengan sistem kelompok guna memperbaiki taraf hidup keluarga pra-sejahtera atau berpenghasilan rendah menuju ke taraf sejahtera.

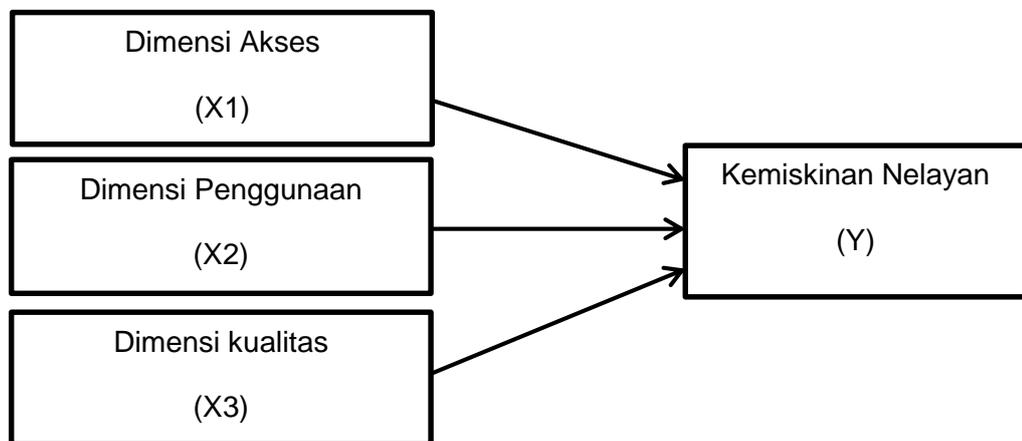
3. Penerapan *Financial Inclusion* pada Pembiayaan Sumut Sejahtera yang ada di Bank Sumut Syariah sudah sangat jelas manfaatnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang bersumber daya manusia dengan menghindari riba dan menetapkan bagi hasil dalam menegakkan kemaslahatan ummat.
4. Partisipasi lembaga keuangan dalam pengembangan *Financial Inclusion* secara tepat adalah dengan mengembangkan program yang tidak hanya mengandalkan usaha pada penghimpunan dana tabungan atau pembiayaan, tetapi harus ikut aktif mengentaskan kemiskinan melalui pembangunan keluarga dengan akses pembiayaan yang lebih luas bagi keluarga atau masyarakat miskin.

**Keenam** penelitian yang oleh Fransiska Marlina Purba yang berjudul “Analisis Keterkaitan Indeks Inklusi Keuangan terhadap Kemiskinan Dan Ketimpangan Pendapatan Jawa Tengah 2010-2014” Metode yang digunakan adalah analisis indeks inklusi keuangan dan analisis uji hubungan kausalitas antara indeks inklusi keuangan terhadap tingkat kemiskinan dan pemerataan pendapatan. Hasil uji kausalitas indeks inklusi keuangan terhadap indeks gini menunjukkan hubungan satu arah dimana indeks gini mempengaruhi indeks inklusi keuangan. Sedangkan hubungan kausalitas indeks inklusi keuangan dengan tingkat kemiskinan menunjukkan tidak adanya hubungan kausalitas.



## 2.4 Kerangka pikir

Sejalan dengan tujuan penelitian yang telah disebutkan sebelumnya, selanjutnya diuraikan dalam kerangka pikir mengenai Pengaruh inklusi keuangan terhadap kemiskinan nelayan di Kabupaten Bulukumba. Penelitian ini bertujuan menganalisis sejauh mana keuangan inklusif dengan tiga indikator utamanya (dimensi akses, dimensi penggunaan, dan dimensi kualitas) berperan dalam pengentasan kemiskinan.



**Gambar 2.1 Kerangka pikir**

Dari kerangka di atas, dapat dijelaskan bahwa Dimensi Akses, Dimensi Penggunaan, dan Dimensi Kualitas berpengaruh terhadap Kemiskinan Nelayan di Kabupaten Bulukumba.



## 2.5 Hipotesis

Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian, maka dapat dibuat dugaan sementara yaitu :

1. Diduga bahwa dimensi akses keuangan inklusif akan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan masyarakat nelayan di Kabupaten Bulukumba.
2. Diduga bahwa dimensi penggunaan keuangan inklusif akan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan masyarakat nelayan di Kabupaten Bulukumba.
3. Diduga bahwa dimensi kualitas keuangan inklusif berpengaruh negatif terhadap kemiskinan masyarakat nelayan di Kabupaten Bulukumba.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah langkah dan prosedur yang dilakukan dalam pengumpulan data atau informasi empiris guna memecahkan permasalahan dan menguji hipotesis penelitian.

#### **3.1 Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh keuangan inklusif dalam perannya mengurangi kemiskinan. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Bentenge, Kelurahan Ela-ela, Kalumeme, dan Bintarore Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba. Variabel yang digunakan adalah dimensi akses, penggunaan, dan kualitas yang berpengaruh terhadap kemiskinan nelayan.

#### **3.2 Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Metode kuantitatif menggunakan jenis data yang dapat dinyatakan dalam bentuk angka dan memiliki satuan hitung.

#### **3.3 Variabel Penelitian dan Pengukurannya**

Variable independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah dimensi akses, dimensi penggunaan, dan dimensi kualitas. Sedangkan variable dependen yang digunakan adalah kemiskinan nelayan

#### **3.4 Populasi**

Dalam penelitian ini jumlah populasi nelayan miskin di Kabupaten Bulukumba belum diketahui secara pasti namun berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2017 jumlah penduduk usia 15 tahun ke Atas yang bekerja lapangan pekerjaan utama dalam bidang Pertanian, Perburuan,

